

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023  
DINAS KETAHANAN PANGAN



DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jln. Mahoni No.2 Lubuk Pakam

Nomor Telepon : (061) - 7952622

Website : [ketapang.deliserdangkab.go.id](http://ketapang.deliserdangkab.go.id)

E-mail : [bkpdeliserdang@gmail.com](mailto:bkpdeliserdang@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian DINAS KETAHANAN PANGAN tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, Januari 2024  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG

Tengku M. Zaki Aufa, S. Sos, MAP  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19730426 199203 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Penjelasan Umum Organisasi.....	2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
Anggaran .....	3
Dasar Hukum .....	4
Sistematika Laporan Kinerja .....	4
<b>BAB II.....</b>	<b>6</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	6
Rencana Kinerja Tahun n .....	7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	8
<b>BAB III .....</b>	<b>19</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>19</b>
Capaian Kinerja .....	19
Skala Capaian Kinerja.....	20
Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	20
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	23
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	24
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) .....	25

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	25
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	27
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	27
Realisasi Anggaran .....	29
<b>BAB IV.....</b>	<b>31</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n .....	4
<b>Tabel 2.1</b> Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis .....	6
<b>Tabel 2.2</b> Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n .....	7
<b>Tabel 2.3</b> Rencana Kinerja Tahun n.....	7
<b>Tabel 2.4</b> Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah .....	8
<b>Tabel 2.5</b> Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n.....	9
<b>Tabel 3.1</b> Pengkategorian Capaian Kinerja .....	20
<b>Tabel 3.2</b> Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n .....	20
<b>Tabel 3.3</b> Perbandingan Capaian Kinerja .....	23
<b>Tabel 3.4</b> Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	24
<b>Tabel 3.5</b> Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota .....	25
<b>Tabel 3.6</b> Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....	26
<b>Tabel 3.7</b> Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	27
<b>Tabel 3.8</b> Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan .....	28
<b>Tabel 3.9</b> Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	30

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Struktur Organisasi.....	3
--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS KETAHANAN PANGAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

### **Penjelasan Umum Organisasi**

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS KETAHANAN PANGAN :

### **Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, DINAS KETAHANAN PANGAN mempunyai tugas :

Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan (meliputi urusan penyelenggaraan dan pembinaan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, keamanan pangan serta konsumsi dan penganekaragaman pangan di kabupaten).

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS KETAHANAN PANGAN mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang pangan;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas dibidang pangan;

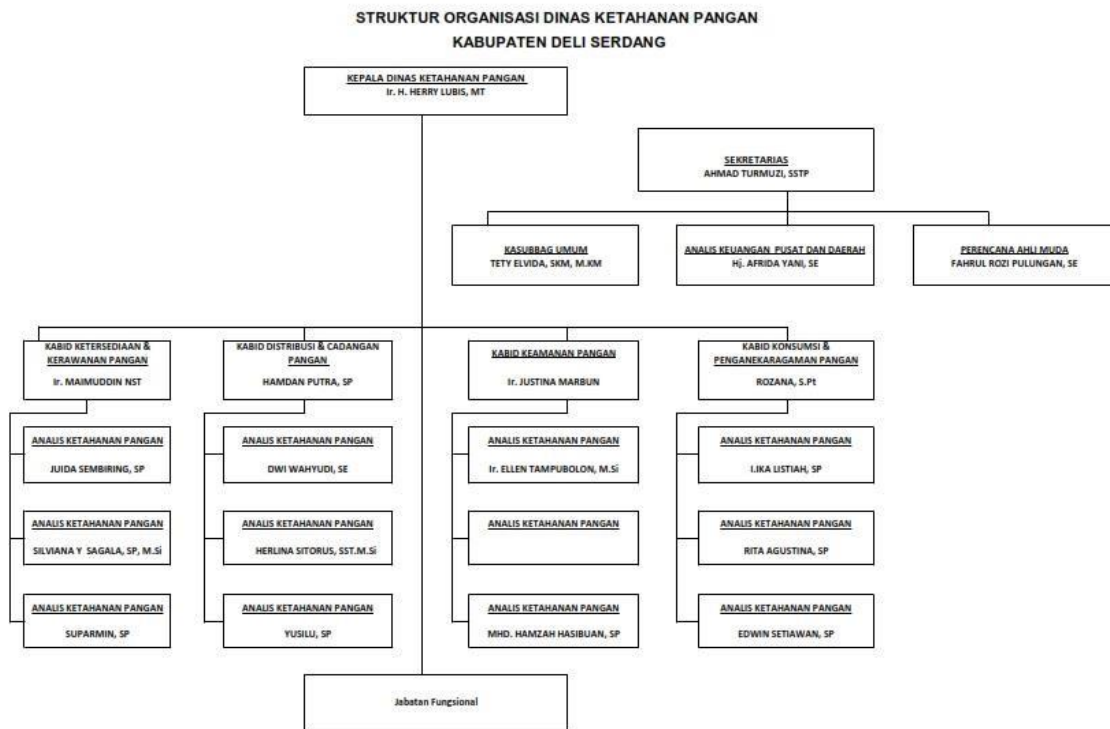


- o Pelaksanaan administrasi dibidang pangan;
- o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja DINAS KETAHANAN PANGAN. Berikut bagan struktur organisasi DINAS KETAHANAN PANGAN.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS KETAHANAN PANGAN**

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Ketahanan Pangan



### Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS KETAHANAN PANGAN. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS KETAHANAN PANGAN :

**Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n**

<b>Sumber</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-2 (2021)	Rp.8.901.278.201
A PBD	Tahun n-1 (2022)	Rp.10.751.029.783
APBD	Tahun n (2023)	Rp.7.892.286.513

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan

### **Dasar Hukum**

Laporan Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Nomor 67. A Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **Sistematika Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023 adalah:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

**BAB II            PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III            AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1    Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

**3.2    Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV            PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN**

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS KETAHANAN PANGAN adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Konsumsi Pangan dan Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang transparan dan Akuntabel. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS KETAHANAN PANGAN:

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2020	2021	2023	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan	1.1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	60	62	64	66	68
2	Mewujudkan Tata kelola Perangkat Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah	LHE-AKIP	70	72	74	76	78
				Indeks Kepuasan Masyarakat	77	78	79	80	81

Sumber : Renstra DINAS KETAHANAN PANGAN Periode 2023 - 2024

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS KETAHANAN PANGAN adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan	
					Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	1.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	presentase	Total Bobot Masing-masing Kelompok Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah	2.1	LHE-AKIP	poin	LHE- AKIP	INSPEKTORAT
		2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	Total= Total dari nilai perunsur/Total Unsur Yang Terisi	Sekretariat / Bagian Umum

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023

### Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023 :

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n DINAS KETAHANAN PANGAN**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1		1.1	Meningkatnya Skor Pola	Skor Pola Pangan	66	perse ntase

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Harapan (PPH)		
2		1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah	LHE-AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat	76 80	Poin Poin

Sumber : Rencana Kerja DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2023

### **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	66
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	LHE-AKIP	76
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS KETAHANAN PANGAN :

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	persentase
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persentase

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan



<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35	Orang/ Bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Laporan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persentase
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut Kelengkapan	34	Paket

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	persentase
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	6	paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	31	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan	39	Paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	7	Paket
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Tamu	12	Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120	Laporan
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan pelayanan pengadaan barang	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	0	Unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	12	Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	persentase
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan perorangan dinas	7	Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	0	Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang Dipelihara	3	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	11	Unit
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Pertumbuhan Lumbung Pangan Masyarakat	0	Persentase

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kemandirian pangan	0	persentase
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	0	Unit
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai jemur yang tersedia	0	Unit
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	0	Unit
III	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase konsumsi pangan berkualitas	66	Persentase
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Persentase stabilitas harga pangan pokok dan pangan lainnya	74	Persentase

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	1	Laporan
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1	laporan
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1	Dokumen
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	5	Unit
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	10	Persentase
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	20	Ton
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	20	Ton

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase kelompok wanita yang melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan	1.3	Persentase
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun	1	Dokumen
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Laporan
IV	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	20	Persentase
1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran bantuan kepada keluarga kurang tahan pangan	0.52	Persentase
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada	Jumlah pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan	1	dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
V	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Tangan Asal Tumbuhan (PSAT) yang memiliki sertifikat	20	Persentase
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase memfasilitasi pengujian Laboratorium Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	20	persentase
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	Sertifikat
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS KETAHANAN PANGAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	66	68.5	103,79	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat Daerah	LHE-AKIP	76	76.86	101.13	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,18	100,22	Sangat Tinggi	Sekretariat / Bagian Umum

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai pada tahun 2023 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024, perbandingan antara target dan realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar **66 %** dengan realisasinya sebesar **68,5%**, sehingga capaian kinerjanya sebesar **103,79%**, untuk **Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80 Point dengan realisasinya 80,18 Point, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,22%** dan **LHE-AKIP sebesar 76 Point dengan realisasinya 76,86% sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,13%**, maka realisasi dikategorikan **Sangat Tinggi**. Walaupun Skor Pola Pangan Harapan

realisasinya melebihi target dan dikategorikan Sangat tinggi ,namun konsumsi pangan penduduk Kabupaten Deli Serdang masih rendah dan belum beragam, bergizi dan seimbang antar sembilan kelompok pangan utama dari idealnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah 100 %. Penyebab rendahnya PPH penduduk Kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh masih rendahnya konsumsi sembilan kelompok bahan pangan terutama 5 (lima) pangan utama yaitu sayur dan buah, kacang-kacangan, padi-padian, pangan hewani dan umbi-umbian sehingga mengakibatkan rendahnya konsumsi energi masyarakat. Namun pada Tahun 2023 pelaksanaan survei Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, sehingga nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat di gunakan berdasarkan survei Tahun 2022.

Tindak lanjut hasil evaluasi dari tahun sebelumnya dari Inspektorat:

No	Rekomendasi	Status
1	Agar pada evaluasi berikutnya menyertakan dokumen bukti dukung dalam pemenuhan perencanaan kinerja berupa dokumen perencanaan anggaran	Sudah ditindaklanjuti tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran
2	Agar menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang	Sudah ditindaklanjuti, Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung berdasarkan ketersediaan/kemampuan anggaran.
3	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu	Sudah ditindaklanjuti
4	Membuat laporan hasil pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala	Sudah ditindaklanjuti, berupa laporan evaluasi kinerja pertriwulan

5	Melakukan sosialisasi agar setiap unit/satuan kerja dapat sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Sudah ditindaklanjuti, koordinasi dengan instansi terkait dan perjanjian kinerja
6	Melakukan sosialisasi terhadap Pegawai agar dapat memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Sudah ditindaklanjuti, rapat internal dan perjanjian kinerja
7	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural dan fungsional	Sudah ditindaklanjuti, adanya penilaian SKP lewat E-Kinerja
8	Menjadikan pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi	Sudah ditindaklanjuti, adanya perjanjian kinerja
9	Melakukan sosialisasi internal terkait pengukuran kinerja agar setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Sudah ditindaklanjuti, Rapat Internal
10	Melakukan sosialisasi internal terkait pengukuran kinerja agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Sudah ditindaklanjuti, evaluasi internal

10	Agar mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada website OPD	Sudah ditindaklanjuti, tersediannya website perangkat daerah
11	Melakukan sosialisasi/rapat internal terkait pembuatan LKIP agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Sudah ditindaklanjuti, rapat internal
12	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Sudah ditindaklanjuti, melalui laporan evaluasi kinerja pertriwulan dan lewat aplikasi PAKDE
13	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Sudah ditindaklanjuti, melalui laporan evaluasi kinerja pertriwulan dan lewat aplikasi PAKDE
14	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Sudah ditindaklanjuti, evaluasi internal

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dimulai dari tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	59,77	64,1	68,5	66	68.5	103,79
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat Daerah	LHE-AKIP	62,14	74,64	76,35	76	76.86	101,13
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,41	78,51	79,12	80	80,18	100,22

**Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KETAHANAN PANGAN periode 2023-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	68,5	68	100,73
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah	LHE-AKIP	76,86	78	98,53
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,18	81	98,98



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	perangkat daerah				

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat kemajuan tahun 2023 dengan kinerja jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang pada Indikator Kinerja Utama rata-rata mengalami kemajuan sebesar **99,41%**.

**Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/  
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	68.5	100	68,5

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	66	68.5	103,79	Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi dalam mencapai Penganekaragaman Pangan dan Kualitas Konsumsi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukan kerja sama yang baik antara semua lintas sectoral dalam menangani masalah pangan di masyarakat</li> <li>• Sosialisasi dan promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman harus tetap dilakukan secara berkesinambungan di berbagai kalangan masyarakat</li> <li>• Pengembangan dan pemanfaatan pangal lokal serta lahan perkarangan perlu ditingkatkan</li> </ul>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah	LHE-AKIP	76	76,86	101,13	Pelayanan public belum maksimal dan sarana prasarana masih terbatas	Upaya terus melakukan peningkatan pelayanan publik serta peningkatan sarana dan prasarana.
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,18	100,22		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang

### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	66	68,5	103,79	1.591.065.276	811.992.800	51,03	50,84
2	LHE-AKIP	76	76,86	101,13	5.126.640.479	4.399.552.451	85,81	15,15
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,18	100,22	1.174.580.758	638.085.895	58,15	41,98

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkat nya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	103,79	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	0	Tidak Menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Tangan Asal Tumbuhan (PSAT) yang memiliki Sertifikat	25	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATA N DIVERSIFIKAS I DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase konsumsi pangan berkualitas	103,79	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkat nya kualitas pelayanan Kinerja perangkat daerah	LHE-AKIP  Indeks Kepuasan Masyara kat	101,13  100,22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	81	Menunjang

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel:

Demi perbaikan Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Deli Serdang ke arah yang lebih baik maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua lintas setoral dalam menangani masalah pangan masyarakat kabupaten Deli Serdang dan sosialisasi dan promosi pangan beragam , bergizi seimbang dan aman tetap dilakukan secara berkesinambungan di berbagai kalangan masyarakat serta lahan perkarangan perlu di tingkatkan untuk meningkatkan konsumsi terhadap umbi-umbian serta sayur dan buah, perlunya kajian lebih lanjut tentang metode penghitungan pola pangan harapan (PPH) yang lebih peraktis dan juga studi lanjutan untuk menegetahui penyebab rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan perlunya penambahan anggaran.

#### Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.145.565.612	429.781.500	37,51
2.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	123.117.570	0	0
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	322.382.094	111.307.500	34,52
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	6.301.221.237	5.082.638.346	80,66

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel:

Pagu anggaran yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Deli Serdang tahun 2023 yang dialokasikan melalui dana APBD setelah perubahan sebesar **Rp.7.892.377.513,-**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN adalah kurangnya kesadaran dan perang serta masyarakat dalam berpartisipasi dalam capai penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan yang beradaptasi, bergizi, seimbang dan aman. Serta juga pelayanan publik yang belum maksimal dan sarana prasarannya masih terbatas.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS KETAHANAN PANGAN adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu.
  - b. Agar seluruh pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

- c. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap Rencana aksi kinerja sehingga rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis dengan bukti pendukung notulen rapat, daftar hadir, maupun berita acara.
- d. Melakukan sosialisasi internal terkait perencanaan kinerja maupun rencana aksi kinerja agar setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- e. Melakukan sosialisasi internal terkait perencanaan kinerja maupun rencana aksi kinerja agar setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

## 2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi.
- b. Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengukuran) tunjangan kinerja/penghasilan.
- c. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- d. Melakukan sosialisasi internal terkait pengukuran kinerja agar setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- e. Melakukan sosialisasi internal terkait pengukuran kinerja agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.



### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Agar mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada website OPD.
- b. Melakukan sosialisasi/rapat internal terkait pembuatan LKIP agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- c. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- e. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Lubuk Pakam, Januari 2024  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG

Tengku M. Zaki Aufa, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19730426 199203 1 005

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. HERRY LUBIS, MT  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASHARI TAMBUNAN  
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

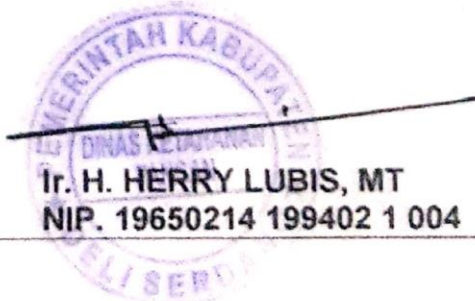
Lubuk Pakam, 2022

Pihak Kedua,



ASHARI TAMBUNAN

Pihak Pertama,



Ir. H. HERRY LUBIS, MT  
NIP. 19650214 199402 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	66 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Point
		2. LHE-AKIP	76 Point

NO	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.127.642.567	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.131.726.308	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	302.641.606	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	164.635.622	APBD

Lubuk Pakam,

2023



Lampiran 2 Matriks Renstra ( 5 Tahun )

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF MENCAKUP PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Perencanaan Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
Meningkatkan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	4.845.279.500	100 %	5.107.794.000	100 %	5.398.191.000	100 %	5.859.740.000	100 %	5.542.740.000	100 %	21.908.465.000	DKP	Sekretaris
	Tersedianya Pelayanan, Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	49.000.000	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	170.000.000	100 %	168.000.000	100 %	518.000.000	DKP	Sekretaris
	tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	48.000.000	1 dokumen	48.000.000	5 dokumen	156.000.000	DKP	Bagian Perencanaan
	tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	5 dokumen	28.000.000	DKP	Bagian Perencanaan
	tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	5 dokumen	44.000.000	DKP	Bagian Perencanaan
	tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	5 dokumen	44.000.000	DKP	Bagian Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Bidang Ususan Peminintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Perencanaan Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta				
	tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	5 dokumen	44.000.000	DKP	Bagian Perencanaan
	tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	7.000.000	1 laporan	7.000.000	1 laporan	7.000.000	1 laporan	17.000.000	1 laporan	15.000.000	5 laporan	46.000.000	DKP	Bagian Perencanaan
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	7.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	53.000.000	1 laporan	53.000.000	5 laporan	156.000.000	DKP	Bagian Perencanaan
	<b>Tersedianya Pelayanan Keuangan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>4.279.279.500</b>	<b>100 %</b>	<b>4.307.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>4.307.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>4.492.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>4.492.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>17.598.000.000</b>	<b>DKP</b>	<b>Sekretaris</b>
	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	4.172.279.500	35 Orang/Bulan	4.200.000.000	35 Orang/Bulan	4.200.000.000	35 Orang/Bulan	4.345.000.000	35 Orang/Bulan	4.345.000.000	175 Orang/Bulan	17.090.000.000	DKP	Bagian Keuangan
	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	5 dokumen	460.000.000	DKP	Bagian Keuangan
	tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	7.000.000	1 laporan	7.000.000	1 laporan	7.000.000	1 laporan	17.000.000	1	17.000.000	5 laporan	48.000.000	DKP	Bagian Keuangan

Tujuan	Sasaran	Bidang Ususan Peminanaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Perencanaan Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta				
	<b>Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>29.400.000</b>	<b>100 %</b>	<b>29.400.000</b>	<b>100 %</b>	<b>31.740.000</b>	<b>100 %</b>	<b>31.740.000</b>	<b>100 %</b>	<b>122.280.000</b>	<b>DKP</b>	<b>Sekretaris</b>
	tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 Unit	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	5 Unit	<b>24.000.000</b>	DKP	Kasubag Umum
	tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	34 Paket	36 Paket	22.000.000	36 Paket	23.400.000	36 Paket	23.400.000	36 Paket	25.740.000	36 Paket	25.740.000	178 Paket	<b>98.280.000</b>	DKP	Kasubag Umum
	<b>Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>174.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>276.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>276.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>296.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>291.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.139.000.000</b>	<b>DKP</b>	<b>Sekretaris</b>
	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	5 paket	<b>24.000.000</b>	DKP	Kasubag Umum
	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	20.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	20.000.000	4 paket	36.000.000	4 paket	36.000.000	20 paket	<b>112.000.000</b>	DKP	Kasubag Umum
	tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket perabotan rumah tangga yang disediakan	5 paket	5 paket	3.000.000	5 paket	3.000.000	5 paket	3.000.000	5 paket	3.000.000	5 paket	3.000.000	25 paket	<b>12.000.000</b>	DKP	Kasubag Umum
	tersedianya bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 paket	15 paket	7.000.000	15 paket	9.000.000	15 paket	9.000.000	15 paket	12.000.000	15 paket	12.000.000	75 paket	<b>42.000.000</b>	DKP	Kasubag Umum
	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	6.000.000	4 paket	6.000.000	4 paket	6.000.000	4 paket	6.000.000	4 paket	6.000.000	20 paket	<b>24.000.000</b>	DKP	Kasubag Umum

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Perencanaan Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta				
	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	4 dokumen	2.000.000	DKP	Kasubag Umum
	terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12.000.000	12 laporan	12.000.000	12 laporan	12.000.000	12 laporan	12.000.000	12 laporan	12.000.000	60 laporan	48.000.000	DKP	Kasubag Umum
	terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	24 laporan	120.000.000	40 laporan	220.000.000	40 laporan	220.000.000	40 laporan	220.000.000	40 laporan	215.000.000	200 laporan	875.000.000	DKP	Kasubag Umum
	<b>Tersedianya Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>21.394.000</b>	<b>100 %</b>	<b>311.394.000</b>	<b>100 %</b>	<b>321.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>674.788.000</b>	<b>DKP</b>	<b>Sekretaris</b>
	tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	290.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	-	5 Unit	590.000.000	DKP	Kasubag Umum
	tersedianya mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	3 Unit	3 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	15 Unit	60.000.000	DKP	Kasubag Umum
	tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	6.000.000	2 unit	6.394.000	2 unit	6.394.000	2 unit	6.000.000	2 unit	6.000.000	10 unit	24.788.000	DKP	Kasubag Umum
	<b>Tersedianya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>124.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>194.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>194.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>254.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>244.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>886.000.000</b>	<b>DKP</b>	<b>Sekretaris</b>
	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	60 laporan	80.000.000	DKP	Kasubag Umum

Tujuan	Sasaran	Bidang Ususan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Perencanaan Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta				
	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	24.000.000	12 laporan	24.000.000	12 laporan	24.000.000	12 laporan	24.000.000	12 laporan	24.000.000	60 laporan	96.000.000	DKP	Kasubag Umum
	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	80.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	210.000.000	12 laporan	200.000.000	60 laporan	710.000.000	DKP	Kasubag Umum
	<b>Tersedianya Pelayanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>170.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>190.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>190.397.000</b>	<b>100 %</b>	<b>295.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>295.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>970.397.000</b>	<b>DKP</b>	<b>Sekretaris</b>
	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan, perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	3 Unit	70.000.000	3 Unit	70.000.000	3 Unit	70.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	15 Unit	340.000.000	DKP	Kasubag Umum
	terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	12 unit	12 unit	20.000.000	12 unit	20.000.000	12 unit	20.397.000	12 unit	20.000.000	12 unit	20.000.000	60 unit	80.397.000	DKP	Kasubag Umum
	terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	5 Unit	80.000.000	DKP	Kasubag Umum
	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	125.000.000	1 unit	125.000.000	5 unit	350.000.000	DKP	Kasubag Umum
	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	5 unit	120.000.000	DKP	Kasubag Umum




Tujuan	Sasaran	Bidang Usuan Peminoritan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Perencanaan Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta				
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pertumbuhan Lumbung Pangan Masyarakat	20 %	20 %	167.000.000	20 %	167.000.000	20 %	100.000.000	20 %	190.000.000	20 %	190.000.000	100 %	647.000.000	DKP	Kadis
	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Pasaran Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kemandirian pangan	4,5 %	4,5 %	167.000.000	4,5 %	167.000.000	4,5 %	100.000.000	4,5 %	190.000.000	4,5 %	190.000.000	23 %	647.000.000	DKP	Kabid
	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 unit	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	5 Unit	400.000.000	DKP	Kasi
	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur Yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	71.000.000	1 Unit	71.000.000	5 Unit	242.000.000	DKP	Kasi
	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 unit	1 unit	17.000.000	1 unit	17.000.000	1 unit	17.000.000	1 unit	19.000.000	1 unit	19.000.000	5 unit	72.000.000	DKP	Kasi
Meningkatkan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Konsumsi Pangan Berkualitas	58 %	60 %	595.000.000	62 %	700.000.000	64 %	873.000.000	66 %	1.519.714.000	68 %	1.482.714.000	68 %	4.575.428.000	DKP	Kadis
	Terjaganya stabilitas harga	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase stabilitas harga pangan pokok dan pangan lainnya	74 %	74 %	255.000.000	74 %	270.000.000	74 %	405.000.000	74 %	833.714.000	74 %	833.714.000	74 %	2.342.428.000	DKP	Kabid
	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	3 Laporan	165.000.000	DKP	Kasi

Tujuan	Sasaran	Bidang Usuan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Perencanaan Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta				
	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	341.450.000	1 laporan	341.450.000	5 laporan	982.900.000	DKP	Kasi
	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen pemantauan sbk pasokan dan harga pangan	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	202.380.000	1 Dokumen	202.380.000	5 Dokumen	504.760.000	DKP	Kasi
	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan distribusi pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	4 Unit	4 Unit	70.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	77.000.000	4 Unit	77.000.000	20 Unit	294.000.000	DKP	Kasi
	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	- unit	7 unit	35.000.000	- unit	-	13 unit	100.000.000	13 unit	147.884.000	13 unit	147.884.000	39 unit	395.768.000	DKP	Kasi
	Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	10 %	10 %	170.000.000	10 %	170.000.000	10 %	170.000.000	10 %	308.000.000	10 %	308.000.000	50 %	956.000.000	DKP	Kabid
	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	20 Ton	100.000.000	20 Ton	100.000.000	20 Ton	100.000.000	20 Ton	165.000.000	20 Ton	165.000.000	100 Ton	530.000.000	DKP	Kasi
	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	20 Ton	20 Ton	70.000.000	20 Ton	70.000.000	20 Ton	70.000.000	20 Ton	143.000.000	20 Ton	143.000.000	100 Ton	426.000.000	DKP	Kasi
	Meningkatnya minat masyarakat terhadap pengankaragaman konsumsi pangan yang berbasis Sumber daya lokal pada kelompok wanita	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengankaragaman konsumsi pangan	1,3 %	1,3 %	170.000.000	1,3 %	260.000.000	1,3 %	298.000.000	1,3 %	378.000.000	1,3 %	341.000.000	6,3 %	1.277.000.000	DKP	Kabid
	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun	1 dokumen	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	88.000.000	1 dokumen	88.000.000	5 dokumen	326.000.000	DKP	Kasi

Tujuan	Sasaran	Bidang Usuan Peminanaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Perencanaan Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta				
	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	190.000.000	1 laporan	218.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	253.000.000	5 laporan	951.000.000	DKP	Kasi
Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	20 %	20 %	80.000.000	20 %	105.000.000	20 %	205.000.000	20 %	238.481.000	20 %	338.481.000	100 %	886.962.000	DKP	Kadis
	Tersedianya dokumen peta kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	- %	- %	-	- %	-	100 %	100.000.000	-	-	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	DKP	Kabid
	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	- dokumen	- Penyusunan, Pa	-	- dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	- dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	2 dokumen	200.000.000	DKP	Kasi
	Tersedianya bantuan penanganan dan pembinaan terhadap keluarga kurang tahan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran Bantuan Kepada Keluarga kurang tahan pangan	0,52 %	0,52 %	80.000.000	0,52 %	105.000.000	0,52 %	105.000.000	0,52 %	238.481.000	0,52 %	238.481.000	2 %	686.962.000	DKP	Kabid
	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	238.481.000	1 dokumen	238.481.000	5 dokumen	686.962.000	DKP	Kabid

Tujuan	Sasaran	Bidang Ususan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Perencanaan Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2020										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta	Target	Rp.Juta				
Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memiliki sertifikat	20 %	20 %	230.000.000	20 %	289.000.000	20 %	289.000.000	20 %	588.409.000	20 %	569.681.000	100 %	1.736.090.000	DKP	Kadis
	Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase memfasilitasi pengujian Laboratorium Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	20 %	20 %	230.000.000	20 %	289.000.000	20 %	289.000.000	20 %	588.409.000	20 %	569.681.000	100 %	1.736.090.000	DKP	Kabid
	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang Dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	118.000.000	1 Dokumen	110.000.000	5 Dokumen	348.000.000	DKP	Kasi
	Tersertifikasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	10 sertifikat	10 Sertifikasi Kea	80.000.000	10 sertifikat	115.000.000	10 sertifikat	115.000.000	10 sertifikat	210.000.000	10 sertifikat	190.000.000	50 sertifikat	630.000.000	DKP	Kasi
	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	114.000.000	1 dokumen	114.000.000	1 dokumen	260.409.000	1 dokumen	268.681.000	5 dokumen	758.090.000	DKP	Kasi
						5.917.279.500		6.368.794.000		6.865.191.000		8.396.344.000		8.123.616.000		29.753.945.000		

Lubuk Pakam, 1 Desember 2021  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Deli Serdang

  
Ir. H. HERRY LUBIS, MT  
NIP.19650214 199402 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514  
Telepon (061) - 7951646 Faks. (061) - 7951646  
E-mail : inspektoratdeliserdang@gmail.com

Lubuk Pakam, 11 Agustus 2023.

Nomor : 700.1.2.1 / LHE. SAKIP. 30.25 / 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) pada

Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.

Kepada :

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Deli Serdang

Di-

Lubuk Pakam.

Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dengan berpedoman Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : 094/DD/110/2023 tanggal 15 Juni 2023.

### b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, perlu diketahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, perlu dilakukan evaluasi



AKIP atau evaluasi pelaksanaan SAKIP di setiap instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

**e. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan pada evaluasi ini adalah

- 1) Pengumpulan Dokumen
- 2) Analisa dan Penilaian
- 3) Pengamatan dan Wawancara

**f. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris, membawahi:
  - a) Sub Bagian Umum;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Program;
- 3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
  - a) Seksi Ketersediaan Pangan;



- b) Seksi Sumber Daya Pangan;
- c) Seksi Kerawanan Pangan;
- 4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
  - a) Seksi Distribusi Pangan;
  - b) Seksi Harga Pangan;
  - c) Seksi Cadangan Pangan;
- 5) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi :
  - a) Seksi Konsumsi Pangan;
  - b) Seksi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  - c) Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
- 6) Bidang Keamanan Pangan membawahi :
  - a) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
  - b) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
  - c) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- 7) Sumber Daya Manusia.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang memiliki sumber daya manusia sebanyak 36 orang. Sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu kunci dan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah.**

Implementasi SAKIP organisasi perangkat daerah dievaluasi oleh tim evaluator dimana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), IKU, Rencana Aksi serta dokumen keterkaitannya.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa unit kerja yang bersangkutan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

**h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

Bersama dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang juga memberikan rekomendasi yang kemudian belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Status
1	Mempublikasikan RENSTRA, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atau ke website Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang	Sudah ditindaklanjuti
2	Seluruh Pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Sudah ditindaklanjuti



No	Rekomendasi	Status
3	Melakukan pemantauan secara berkala terhadap Rencana aksi kinerja sehingga rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis dengan bukti pendukung notulen rapat, daftar hadir, maupun berita acara.	belum ditindaklanjuti
4	Melakukan sosialisasi internal terkait perencanaan kinerja maupun rencana aksi kinerja agar setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	belum ditindaklanjuti
5	Melakukan sosialisasi internal terkait perencanaan kinerja maupun rencana aksi kinerja agar setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	belum ditindaklanjuti
6	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi.	Sudah ditindaklanjuti
7	Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	sudah ditindaklanjuti
8	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	belum ditindaklanjuti
9	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar seluruh pegawai peduli atas hasil pengukuran kinerja.	belum ditindaklanjuti
10	Melakukan sosialisasi internal terkait pengukuran kinerja agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja pegawai.	belum ditindaklanjuti
11	Menggunakan Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	belum ditindaklanjuti
12	Menggunakan Informasi dalam laporan kinerja untuk digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	belum ditindaklanjuti
13	Melakukan sosialisasi/rapat internal terkait pembuatan LKIP agar Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	belum ditindaklanjuti
14	Menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	belum ditindaklanjuti
15	Menggunakan Informasi dalam laporan kinerja untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	belum ditindaklanjuti



## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- a. Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen dan sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

### 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **22,43** dari nilai maksimal **30,00**.

Penilaian perencanaan kinerja meliputi 3 sub komponen perencanaan kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen Perencanaan kinerja menunjukkan bahwa:

- a) **Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia memperoleh nilai 5,40 dari nilai maksimal 6,00**

Adapun kriteria pemenuhan dokumen perencanaan kinerja telah dilengkapi sebagai berikut :

- (1) Terdapat Pedoman teknis perencanaan kinerja.
- (2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
- (3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, yang dilengkapi dengan Renstra.
- (4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang dilengkapi dengan Renja.
- (5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- (6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yang tertuang dalam DPA.

Akan tetapi masih terdapat kriteria yang belum disertakan dengan bukti dukung yaitu dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

- b) **Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) memperoleh nilai 7,28 dari nilai maksimal 9,00.**

Perencanaan kinerja yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan.
- (2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- (3) Kualitas rumusan hasil (tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- (4) Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- (5) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- (6) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

- (7) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- (8) Setiap unit pada satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- (9) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Masih terdapat beberapa kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain :

- (1) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja kurang menantang.
- (2) Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu.

**c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 9,75 dari nilai maksimal 15,00**

Perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- (2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- (3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- (4) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- (5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

Masih terdapat beberapa kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain :

- (1) Rencana Aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala.
- (2) Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- (3) Setiap Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

**2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Hasil penilaian terhadap komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **24,54** dari nilai maksimal **30,00**

Penilaian pengukuran kinerja meliputi 3 sub komponen pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja menunjukkan bahwa:

**a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan memperoleh nilai 5,40 dari nilai maksimal 6,00.**

Pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut :



- (1) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- (2) Telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- (3) Telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

**b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 7,59 dari nilai maksimal 9,00.**

Pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- (2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- (3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- (4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
- (5) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- (6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- (7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

**c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 11,55 dari nilai maksimal 15,00.**

Pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- (2) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- (3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- (4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- (5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- (6) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Terdapat beberapa kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain :

- (1) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- (2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- (3) Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- (4) Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### **3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Hasil penilaian terhadap komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai **11,88** dari nilai maksimal **15,00**.

Penilaian pelaporan kinerja meliputi 3 sub komponen pelaporan kinerja.

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja menunjukkan :

#### **a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja memperoleh nilai 2,55 dari nilai maksimal 3,00**

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- (2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- (3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- (4) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
- (5) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Terdapat kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain :

- (1) Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan pada website OPD.

#### **b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya memperoleh nilai 3,65 dari nilai maksimal 4,50.**

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- (2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- (3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- (4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- (5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.



- (6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- (7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- (8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- (9) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

**c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 5,68 dari nilai maksimal 7,50.**

Pelaporan Kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- (2) Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- (3) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

Beberapa kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain :

- (1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- (2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- (3) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- (4) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

**4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil penilaian terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai **18,00** dari nilai maksimal **25,00**.

Penilaian akuntabilitas kinerja meliputi 1 sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

- (1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.
- (2) Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP karena tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal belum seluruhnya dilaksanakan.
- (3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- (4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- (5) Belum sepenuhnya terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

**b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.**

Terhadap kriteria yang belum sepenuhnya dilengkapi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang beserta jajaran agar melakukan langkah perbaikan sebagai berikut :

**1) Perencanaan Kinerja**

- a) Agar pada evaluasi berikutnya menyertakan dokumen bukti dukung dalam pemenuhan perencanaan kinerja berupa dokumen perencanaan anggaran.
- b) Agar menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang.
- c) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu.
- d) Menmbuat laporan hasil pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala.
- e) Melakukan sosialisasi agar setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) dapat sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- f) Melakukan sosialisasi terhadap Pegawai agar dapat memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

**2) Pengukuran Kinerja**

- a) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- b) Menjadikan Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- c) Melakukan sosialisasi internal terkait pengukuran kinerja agar setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- d) Melakukan sosialisasi internal terkait pengukuran kinerja agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

**3) Pelaporan Kinerja**

- a) Agar mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada website OPD
- b) Melakukan sosialisasi/rapat internal terkait pembuatan LKIP agar Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- c) Menggunakan Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d) Menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- e) Menggunakan Informasi dalam laporan kinerja untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.



#### 4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar mengupayakan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi oleh APIP dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

### 3. PENUTUP

#### a. Simpulan


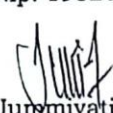
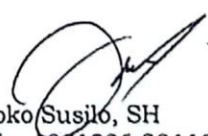
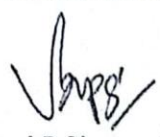
Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 masuk dalam kategori **sangat baik** dengan **predikat BB (76,86)**. Meski sudah mendapat kategori sangat baik, namun masih ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, seperti Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

#### b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI :  
INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG  
  
H. EDWIN NASUTION, SH, MSI CGCAE.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19741221 199803 1 010

TIM EVALUASI :

-   
1. Gita Priscilla Pinem, SH, M.Hum  
Nip. 19820312 200502 2 002
-   
2. Jummiyati, SE  
Nip. 19831007 201103 2 001
-   
3. Joko Susilo, SH  
Nip. 1981226 201101 1 010
-   
4. Samuel P Sinaga, SE,MSi  
Nip. 19810319 200312 1 005

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Bpk. Bupati Deli Serdang